



**UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

RINGKASAN TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Ni Nengah Adiyaryani

B4A 008 064

PEMBIMBING

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Disusun Oleh:

Ni Nengah Adiyaryani

B4A 008 064

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

NIP. 19481212 197603 1 003

**UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

A. PENDAHULUAN

A. 1. Latar Belakang

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspreek*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) tersebut.

Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran,

terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”¹

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tersebut, di bidang substansi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengenyampingkan Pasal 244 KUHAP sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir yang menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP.

Dari adanya putusan bebas, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan bebas tersebut.

Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis seperti tersebut berimplikasi timbulnya kesan bahwa putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu untuk dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana, dalam konteks ini terutama demi tegaknya wibawa esensi putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

A. 2. Permasalahan

Berdasarkan paparan latar belakang yang terurai di atas maka dapat penulis rumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

¹ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, tp, 1982, hal: 161.

1. Apa yang menjadi ide dasar sehingga tidak diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia?
3. Bagaimana upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) direformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang?

A. 3. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini meliputi tujuan dan kontribusi penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ide dasar yang melatar belakangi sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia.
3. Untuk menganalisis reformulasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang.

Sedangkan kontribusi dari penelitian ini yaitu berupa kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Secara keilmuan dalam dunia teoritis atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang secara substansial terfokus pada materi putusan hakim dalam perkara pidana dengan kualifikasi putusan bebas (*vrijspraak*) serta upaya hukumnya

berupa kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

b. Kontribusi Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang jaminan hukum akan hak bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga terdapat jaminan kepastian pengaturan, tidak perlu melakukan interpretasi terhadap pasal dalam KUHAP, khususnya terhadap Pasal 244 KUHAP yang secara lugas melarang Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dan tidak perlu juga melakukan interpretasi terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (khususnya butir 19 dari Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut).

A. 4. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mengenai pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, Barda Nawawi Arief mengartikan:

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.²

Menurut Muladi, bahwa "Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana."³

Pengkajian secara teoritik normatif mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam

² Barda Nawawi Arief (III), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, hal: 197.

³ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, The Habibie Center, 2002, hal: 35.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan pola Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar KUHAP adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan norma hukum di bidang peradilan pidana khususnya terfokus pada upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu didukung oleh komponen sub sistem struktur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat sebagai administrator pelaksana peradilan pidana yang bernaung di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dengan masing-masing Undang-undang organiknya, meliputi: Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berbicara mengenai institusi-institusi penegakan hukum terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana maka dalam hal ini akan terfokus hanya pada institusi Kejaksaan dan Pengadilan.

2. Pengertian Upaya Hukum

Mengenai pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang menyatakan:

Upaya hukum adalah: hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Terkait dengan upaya hukum tersebut maka keadilan yang *relevan* dalam hal ini yakni terwujudnya keadilan sosial yang secara *inheren* disebut dengan keadilan Pancasila, yakni dengan berpijak pada keadilan distributif sebagai landasannya dengan melalui sarana keadilan korektif.

3. Pengertian Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan esensi Pasal 244 KUHAP dan pendapat kalangan doktrina dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa atau penuntut umum. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan pengetrapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan.

4. Pengertian Putusan Bebas

Berikut beberapa pengertian putusan bebas (*vrijspraak*) yang dikemukakan oleh kalangan doktrina, diantaranya:

Djoko Prakoso mengemukakan:

Vrijspraak adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.⁴

Menurut Soekarno, bahwa *Vrijspraak*, adalah, "Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan."⁵

Sedangkan Harun M. Husein berpendapat:

⁴ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal: 270.

⁵ Soekarno, *Dalil Verkapte Ontslag van Rechtsvervolging*, *Pengayoman*, Nomor: 6, Tahun III, Juli 1978, hal: 15.

Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶

5. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) Dan Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)

Berdasarkan pendapat dari beberapa sarjana dan yurisprudensi, akhirnya didapat suatu kesimpulan terkait dengan pengertian dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*), sebagai berikut:

Bahwa dapat ditarik kriteria untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas itu mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni. Kriteria dimaksud, adalah:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.⁷

A. 5. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena “Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁸ Di samping itu digunakan juga suatu pendekatan komparatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan

⁶ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 108.

⁷ Ibid, hal:130.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 13-14.

gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”⁹

3. Jenis Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, yang mencakup: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga dokumentasi hukum berupa yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan bebas; bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti menyangkut penggunaan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan para ahli hukum yang dimuat di media massa yang terkait dengan materi tesis ini serta berupa bahan hukum tertier seperti kamus atau ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tesis ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumenter, pengumpulan bahan dari media cetak dan media elektronik serta menggunakan metode sistematis, yakni pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang berkenaan dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal: 58.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. 1. Ide dasar Yang Melatar Belakangi Tidak Diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritikal terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak tersedia kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, yang dikonsepsi dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut bahwa pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) sebagai pemegang kebijakan yang memformulasikan ide-ide menyangkut esensi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut secara konseptual teoritis tampak dengan tegas tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Beberapa kalangan doktrina memandang dengan versi dan argumen senada dengan pembentuk undang-undang yang memformulasikan rumusan Pasal 244 KUHAP tersebut dengan inti esensi bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimohonkan upaya hukum lagi oleh Jaksa Penuntut Umum baik berupa banding maupun kasasi.

Konstruksi pemikiran teoritikal konseptual para pakar ilmu hukum masing-masing memberikan justifikasi argumennya tentang *ratio legis* atau ide dasar terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang tidak dapat dimintakan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno yang dimuat dalam bukunya Harun M. Husein, mengatakan, “... oleh *memorie*

van toelichting bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat.”¹⁰

Senada dengan pendapat van Bemmelen yakni Soedirjo yang dikutip oleh Harun M. Husein mengatakan bahwa, “Putusan bebas pintu jalan hukum tertutup.”¹¹

Oemar Seno Adji (mantan Ketua MA), sehubungan dengan putusan bebas, menyatakan:

Bagi seorang terdakwa putusan bebas, yang tidak dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya lebih merupakan faktor utama, maka putusan bebas sebagai suatu hak yang diperoleh dan menghilangkan perbuatan pidana yang dituduhkan seyogianya tidak dijadikan dasar mengajukan permintaan kasasi seperti dinyatakan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP (Pasal 244 jo 67 KUHAP).¹²

Demikian beberapa pandangan kalangan doktrina yang pada intinya memberikan konsepsi pemikiran tentang pemberian putusan bebas kepada terdakwa yang dianggapnya sebagai hak yang prinsip, tidak dapat diganggu gugat lagi. Dapat dipahami bahwa putusan bebas yang diperoleh terdakwa merupakan hak yang mutlak. Jadi dalam konteks ini adalah berbicara mengenai “kebebasan” yang merupakan hak asasi kodrati manusia yang diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis dalam lingkup hukum pidana (hukum acara pidana) adalah bebas dari hukuman oleh hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa apabila kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengenai benar atau tidaknya hak tersebut, apakah sudah diperoleh dengan proses yang benar atau tidak, secara teoritis konseptual (ketentuan dalam KUHAP), Jaksa Penuntut Umum sudah tidak diberikan kemungkinan untuk melakukan upaya kontrol atau koreksi baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi.

¹⁰ Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 117.

¹¹ Ibid.

¹² Agus Santoso, *Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh Dikasasi* (Harian Media Indonesia, Rubrik Opini), Selasa, 10 September, 2002, hal: 9.

B. 2. Kebijakan Aplikasi Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

B. 2. 1. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Fungsi dan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan dengan melakukan kontrol horizontal terhadap putusan pengadilan (*vonis*) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) selama ini dalam Sistem Peradilan Pidana atas landasan KUHAP belum ada dasar pengaturannya.

Kondisi seperti ini berimplikasi terdapatnya suatu kesenjangan norma berupa adanya kekosongan norma (*vacuum of norm/leemeeten van normen*), kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) dalam khasanah substansial Sistem Peradilan Pidana kita.

Langkah awal yang dapat dipandang sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) dalam bidang hukum acara pidana yang pada tataran sepintas merupakan upaya penyelamat untuk menjawab atau mengatasi adanya kesenjangan norma berupa adanya kekosongan norma dan norma yang tidak jelas terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, dalam hal ini kebijakan tersebut dimotori oleh pihak eksekutif kala itu, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum,

keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”¹³

Putusan Hakim Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah Putusan Mahkamah Agung Regno: 275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut di atas menjadi acuan dan dasar pembeda secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam hal ini peran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum.

B. 2. 2. Kasus Dan Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia

Fenomena hukum menyangkut putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan, bukan sekedar menjadi perbincangan publik bahkan telah menjadi fakta fenomenal yang mencengangkan.

Indonesia dalam kurun waktu setahun, Januari hingga Desember 2009 menurut laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang dirilis siaran Berita Pagi, Metro TV, 31 Desember 2009, diberitakan bahwa telah terjadi sebanyak 112 *vonis* bebas dalam kasus-kasus berskala besar dan kecil utamanya menyangkut tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang diindikasikan mengandung nuansa korupsi

¹³ Departemen Kehakiman RI, Loc, Cit.

serta kasus-kasus di luar tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh pengadilan.¹⁴

Kasus putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai nilai historis yuridis dalam dunia peradilan pidana kita yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Regno: 275 K/Pid/1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa oleh karena merupakan yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas era berlakunya KUHAP. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan suatu terobosan yang terjadi dalam masa peralihan berlakunya KUHAP yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam melakukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang telah membaku ke dalam yurisprudensi konstan (tetap) bahwa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, Jaksa secara langsung dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa melalui upaya hukum banding terlebih dahulu.

Terhadap kasus-kasus putusan bebas yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dituntut adanya kecermatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun risalah atau memori kasasi sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi adalah benar-benar putusan bebas yang tidak murni sifatnya.

B. 3. Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Akan Datang

Berbicara mengenai reformulasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang pada intinya memuat pola pemikiran prediktif prospektif mengenai ide-ide, gagasan sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dalam *ius constitutum*, dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹⁴ Siaran Berita Pagi, Metro TV, Sabtu, 31 Desember, 2009.

Pidana (KUHP), khususnya Pasal 244 KUHP. Namun sebelumnya diadakan suatu komparasi menyangkut keberadaan putusan bebas dan upaya hukumnya di beberapa negara serta juga dipaparkan mengenai ketentuan-ketentuan normatif universal terkait dengan esensi putusan bebas yang dipakai sebagai rambu-rambu yang memuat kandungan jiwa dari putusan bebas tersebut.

Melalui kajian perbandingan ini akan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaturan dan perumusan hukum acaranya serta prosedur upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas pada praktek peradilan pidana di beberapa negara. Di samping itu juga dapat memberikan manfaat dalam upaya menemukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran untuk mengatasi kesenjangan norma yang terjadi dalam praktek peradilan pidana kita.

B. 3. 1. Ketentuan-Ketentuan Normatif Universal Dalam Dokumen Dokumen Internasional Terkait Dengan Esensi Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pengaturan berbagai kebebasan individu sebagai hak asasi manusia dijamin dan diakui dalam berbagai dokumen internasional.

Pernyataan Sejangat Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang diterima dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dalam beberapa rumusan pasalnya memuat kandungan esensi mengenai pengakuan terhadap hak kebebasan dan persamaan kedudukan di depan hukum yang merupakan jiwa dari putusan bebas serta refleksi dari asas *equality before the law* yang sangat terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 dan 10 UDHR.

Selanjutnya dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* juga memuat mengenai pengakuan terhadap hak

kebebasan dan perlakuan yang sama di depan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (1), 14 ayat (1), 25 dan 26 ICCPR.

B. 3. 2. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Beberapa Negara

a. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Negara Amerika Serikat

Putusan bebas di Amerika Serikat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh Dewan Juri oleh karena hakim di persidangan lebih bersifat pasif, Juri lebih awal punya inisiatif dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Di samping peran Dewan Juri dalam menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, dalam proses peradilan Amerika ada suatu tindakan-tindakan hukum lagi yang dapat memperingan posisi terdakwa, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk sampai bebasnya terdakwa. Wujud tindakan awal sebelum sampai pada persidangan oleh Juri dan hakim adalah berupa adanya tindakan negosiasi atau adanya tawar menawar antara Jaksa Penuntut dengan pihak terdakwa atau kuasanya, dalam hal ini pengacaranya, seberapa berat tuntutan yang disepakati antara kedua pihak. Hal ini dikenal dengan sebutan "*plea bargaining*."¹⁵

Tindakan lainnya yaitu berupa adanya pengakuan rasa bersalah dari terdakwa yang disampaikan pada Jaksa Penuntut sebelum persidangan dimulai (*the guilty plea*).¹⁶

Apabila hal tersebut di atas disepakati Jaksa Penuntut maka Jaksa Penuntut akan menyampaikan rekomendasinya pada pengadilan agar hukumannya nanti diperingan.

Di negara Amerika Serikat terhadap putusan bebas tersebut dilihat secara prosedural tidak dapat naik banding secara langsung oleh Jaksa Penuntut, disebabkan adanya larangan konstitusional yang bersifat ganda (dilarang oleh hukum/konstitusi negara melalui Undang-undang

¹⁵ Sue Titus Reid, *Criminal Justice Procedures and Issues*, West Publishing Company, USA, 1987, hal: 299.

¹⁶ Ibid, hal: 295.

Mahkamah Agung Amerika Serikat (U.S.v. *Sanges*, 144 U.S. 310 (1892) dan *Ball v. U.S.*, 163 U.S. 662, 671 (1896)). Akan tetapi putusan bebas tersebut dapat langsung dikasasi oleh Jaksa Penuntut.¹⁷

b. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Negara Perancis

Sejak bulan Maret tahun 2002 di Perancis telah terjadi suatu perubahan yang merupakan lembaran baru dalam peradilan pidananya, yaitu mulai diterapkan pengadilan juri dengan gaya baru yang dilaksanakan di dalam menangani kasus-kasus yang divonis bebas oleh pengadilan, yakni:

Bahwa putusan bebas oleh Jaksa Penuntut dimungkinkan untuk mengajukan banding kepada *Cour d' appel d' assises* (pengadilan tingkat banding). Hal ini mulai sejak Maret 2002. Begitu pula halnya pengajuan kasasi atas *vonis* bebas oleh Jaksa Penuntut kepada *Cour cassation* (pengadilan tingkat kasasi).¹⁸

Diberikannya hak kepada Jaksa Penuntut untuk mengajukan banding maupun kasasi atas *vonis* bebas dalam praktek peradilan pidana di negara Perancis adalah demi terwujudnya kesetaraan, keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan, sebagai berikut:

Ada sebuah argumen yang mengangkat pertahanan ke posisi “kesetaraan senjata” dengan penuntutan yang diinginkan untuk adil dan efektif. Hal ini diperluas untuk kesetaraan dalam hak-hak untuk mengajukan banding maupun kasasi. Dukungan untuk kesetaraan tersebut dapat ditemukan dalam kalimat pertama Pasal 14 (1) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, “Semua orang harus sama di depan pengadilan.” Terhadap ketentuan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa kesetaraan ini “menjamin kesetaraan senjata”, yang berarti bahwa pada umumnya “hak-hak prosedural yang sama harus diberikan kepada semua pihak” sedemikian rupa sehingga akan ada “tidak kesetaraan senjata jika misalnya hanya

¹⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/acquittal>

¹⁸ <http://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2009/5.html>

Jaksa tapi bukan terdakwa diperbolehkan untuk mengajukan banding maupun kasasi atas keputusan tertentu.” Atau sebaliknya-dengan demikian akan terdapat hak-hak prosedural yang sama.¹⁹

B. 3. 3. Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Yang Akan Datang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam operasionalisasinya sebagai payung hukum (*umbrella act*) hukum acara pidana yang diperankan oleh komponen sub sistem struktur dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah berjalan selama tiga dasa warsa. Sampai saat ini pula secara teoritikal normatif pengaturan akan substansi putusan bebas (*vrijspraak*) sehubungan dengan upaya hukum kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum masih menunjukkan adanya norma yang kabur atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) dan juga terjadinya konflik norma (*conflict of norm/geschild van normen*). Dengan kata lain, mengenai keberadaan pengaturan terhadap putusan bebas terkait dengan upaya hukum kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak diatur secara pasti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara landasan normatif yuridikal terjadi kekosongan norma pengaturan (*vacuum of norm/leemeeten van normen*).

Ketiadaan pengaturan atau adanya norma kosong menyangkut upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, seolah-olah mengindikasikan bahwa ketidak adilan dalam suatu putusan tidak dapat dikoreksi atau diluruskan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menjadi problema yuridis dalam upaya mewujudkan keadilan distributif atas hak yang dimiliki tiap individu di mata hukum, padahal koreksi atas suatu putusan hakim sebelumnya sangat dibutuhkan guna

¹⁹ Ibid.

meluruskan jalannya hukum apabila terjadi ketidakadilan oleh *vonis* hakim yang menyesatkan.

Adanya konflik norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama ini dengan landasan hukum yang lebih di bawah, seperti Keputusan Menteri (Kehakiman) dalam mengatasi kemelut putusan bebas yang dipakai dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh upaya hukum kasasi, apabila dicermati dari dimensi tataran teoritik normatif menunjukkan ketidakilmiahan penanganan secara teoritis terhadap putusan bebas melalui upaya hukum kasasi tersebut.

Sebagai bentuk kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy/criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) terkait dengan reformulasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam rangka merumuskan ketentuan-ketentuan yang lebih baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang maka untuk perspektif ke depan (*ius constituendum*), pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) sebagai pemegang kebijakan legislasi sudah sepatutnya melakukan langkah-langkah hukum, sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP, maksudnya, yakni: bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang perlu dirumuskan secara tegas mengenai pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga adanya kepastian hukum sebagai landasan justifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam rangka memperjuangkan hak-hak pencari keadilan.
2. Menghapus Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (butir 19) oleh karena dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ternyata berimplikasi terjadinya kerancuan hukum, yakni terjadinya

ketentuan norma yang saling bertentangan (*conflict of norm/geschild van normen*) antara peraturan yang berada dalam tataran yang lebih rendah (Keputusan Menteri) ternyata mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam tataran yang lebih tinggi (mengenyampingkan ketentuan pasal yang ada dalam undang-undang, yakni Pasal 244 KUHAP). Kerancuan hukum lainnya sebagai implikasi diterapkannya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dalam penyelesaian upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), yakni timbulnya berbagai interpretasi/multi tafsir dari berbagai kalangan, baik kalangan teoritis, praktisi maupun masyarakat luas terhadap esensi yang terkandung dalam Pasal 244 KUHAP.

3. C. PENUTUP

C. 1. KESIMPULAN

1. Ide dasar yang melatar belakangi sehingga tidak diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yakni, oleh karena pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) menerapkan ide-ide pemikiran yang memandang bahwa putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa dianggap sebagai suatu hak yang diperoleh terdakwa dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa di dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut (butir 19) ditentukan bahwa, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap

putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

3. Untuk masa yang akan datang mestinya dilakukan reformulasi terhadap esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni bahwa Jaksa Penuntut Umum hendaknya diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

C. 2. SARAN

1. Pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi yang tegas dalam mereformulasikan suatu pasal, dalam konteks ini yakni berupa reformulasi terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Ide dasar pemikiran berupa penghargaan terhadap hak kebebasan yang merupakan hak asasi manusia (dalam hal ini berupa penghargaan terhadap putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa oleh pengadilan negeri), hendaknya diseimbangkan dengan pemikiran untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum (asas *equality before the law*) yakni dengan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan kontrol atau koreksi atas putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa guna tercapainya keadilan bagi semua pihak (baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum).
2. Aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai sub unsur sistem struktur peradilan pidana dalam tugasnya terkait dengan kebijakan aplikasi kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*), dalam praktek peradilan pidana yang akan datang hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normatif telah direformulasikan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang yang merupakan landasan yuridis formal praktek acara pidana demi tercapainya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang, pembentuk KUHP hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244 KUHP tersebut, yakni dengan merumuskan mengenai hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas. Oleh karena itu terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang selama ini dijadikan sebagai landasan yuridis pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut hendaknya segera dicabut agar tidak menimbulkan kerancuan hukum, yakni berupa terjadinya konflik norma dimana peraturan yang dalam tataran lebih rendah ternyata mengesampingkan ketentuan pasal yang ada dalam undang-undang (KUHP, yakni terjadi pengeleminasian terhadap Pasal 244 KUHP). Kerancuan hukum lainnya yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menimbulkan adanya multitafsir terhadap esensi Pasal 244 KUHP yang tentunya menghambat proses penegakan hukum (*law enforcement*) oleh karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pengaturan substansi yang terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Di samping itu dari dimensi prosedural, pembentuk KUHP hendaknya merumuskan juga bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas, seharusnya melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum kasasi, dengan maksud agar putusan tersebut tersaring

kebenarannya dan agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, ***Filsafat Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)***, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Kamil,H, M. Fauzan, 2008, ***Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi***, Penerbit: Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Ahmad M. Romli, 2009, ***Perkembangan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*** (Dalam Kapita Selekta Hukum), Penerbit: Widya Padjadjaran, Bandung.
- Ahmad Mujahidin, 2007, ***Peradilan Satu Atap Di Indonesia***, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Allan Coffey, 1994, ***An Introduction to Criminal Justice System and Process***, New York Jersey Prentice, Engelwood Cliff.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Muhammad Asrun, 2004, ***Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto***, Cetakan Pertama, Penerbit: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, ***Hukum Acara Pidana***, Edisi ke 1, Cetakan ke-1, Penerbit: Angkasa, Bandung.
- Arief Sidharta, B, 2008, ***Filsafat Hukum Pancasila***, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Arifin Rahman, 1998, ***Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional***, Penerbit: SIC, Surabaya.
- Atang Ranoemihardja, R, 1981, ***Hukum Acara Pidana***, Penerbit: Tarsito, Bandung.

- Bachsan Mustafa, 2003, ***Sistem Hukum Indonesia Terpadu***, Cetakan 1, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 2007, ***Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004***, Cetakan Pertama, Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (I), 2008, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (II), 2007, ***Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)***, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief (III), 1992, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief (IV), 2008, ***Perbandingan Hukum Pidana***, Edisi 2-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bazar Harahap, A, Nawangsih Sutardi, 2007, ***Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya***, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit: Pecirindo, Jakarta.
- Bemmelen, J. M. van, 1950, ***Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht***, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2002, ***Pokok-Pokok Filsafat Hukum***, Cetakan Ke 4, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, 1982, ***Pedoman Pelaksanaan KUHP***.
- Djoko Prakoso, 1985, ***Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dudu Iswara Machmudin, 2001, ***Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa***, Cetakan ke: 1, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, ***Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai***, Cetakan 1, Penerbit: Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Frans Hendra Winarta, 2000, ***Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan***, Cetakan 1, Penerbit: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Hamrat Hamid H. dan Harun M. Husein, 1992, ***Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)***, Cetakan 1, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi (I), 2000, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Edisi Revisi, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi (II), 1984, ***Pengantar Hukum Acara Pidana***, Cetakan I, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi dan Irdan Dahlan, 1987, ***Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana***, Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, ***Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana***, Cetakan 1, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, 1992, ***Kasasi Sebagai Upaya Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Heri Tahir, 2010, ***Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia***, Penerbit: LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Herman Bakir, 2007, ***Filsafat Hukum Disain dan Arsitektur Kesejarahan***, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hilaire Mc. Coubrey and Nigel D. White, 1993, ***Texbook on Jurisprudence***, Blackstone Press Limited, Second Edition, University of Nottingham London.
- Hiroshi Ishikawa (Dalam: M. Faal, ***Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi/Diskresi Kepolisian***), Cetakan I, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1983, ***Hukum Acara Pidana Di Indonesia***, Penerbit: PT. Tanjung Mas, Semarang.
- Inbau, et. al, 1980, ***Cases and Comments on Criminal Procedure***, New York: The Fondation Press Inc.

- JJ. von Schmid, 1965, **Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (Dari Plato-Kant)** Terjemahan R. Wiratno, dkk, Cetakan ke IV, Penerbit: PT. Pembangunan, Jakarta.
- John Rawls, 1999, **A Theory of Justice (Revisited Edition)**, The Balknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusett.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)**, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Lawrence M. Friedman 1984, **American Law An Introduction**, Second Edition (Terjemahan Wisnu Murti: **Hukum Amerika Sebuah Pengantar**), Cetakan Pertama, Juli 2001, Penerbit: PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Leden Marpaung (I), 1995, **Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya**, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung (II), 1992, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)**, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008, **Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro**, Semarang.
- Mardjono Reksodiputro (I), 1993, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi**, FH. UI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro (II), 1994, **Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Edisi Pertama, Penerbit: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, **Komentar Atas KUHP**, Cetakan 1, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum**

- Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia***, Penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Minkenhof, A, 1967, ***De Nederlandse Strafvordering***, Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Moeljatno, 1980, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, tp.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Siddiq Tgk Armia, 2009, ***Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum***, Cetakan ke-2, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2002, ***Demokratisasi Hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia***, Cetakan Pertama, The Habibie Center.
- Munir Fuady, 2007, ***Dinamika Teori Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Musanef, 1989, ***Sistem Pemerintahan di Indonesia***, Penerbit: CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, 2007, ***Peradilan Bebas Dan Contempt of Court***, Penerbit: Diadit Media, Jakarta.
- Pamudji, 1981, ***Teori Sistem dan Pengertiannya Dalam Manajemen***, Penerbit: Ichtiar Baru, Jakarta.
- Pontang Moerad B. M, 2005, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Praktek Perkara Pidana***, penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Prajudi H. S, A, 1973, ***Dasar-Dasar Office Manajemen***, Penerbit: Ghalia, Jakarta.
- Remington dan Ohlin, 1992, ***Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensiaisme dan Abolisionisme***, Cetakan Kedua (Revisi), Penerbit: Bina Cipta, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Cetakan Kedua, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara, Tb, 2006, ***Tegakkan Hukum Gunakan Hukum***, Cetakan 1, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, ***Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia***, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, H, 2007, ***Hukum Acara Pidana Kontemporer***, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Utsman, 2008, ***Menuju Penegakan Hukum Responsif***, Cetakan I, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Serikat Putra Jaya Nyoman (I), 2008, ***Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana***, Cetakan Ke I. Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Serikat Putra Jaya Nyoman (II), ***Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)***, Bahan Kuliah, Penerbit: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soedirdjo (I), 1984, ***Kasasi Dalam Perkara Pidana***, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soedirdjo (II), 1981, ***Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)***, Penerbit: Ahliyah, Jakarta.
- Soedirdjo (III), 1985, ***Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana***, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto (I), 1983, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Edisi 1, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto (II), 1981, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R, ***Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)***, Penerbit: Politeia, Bogor.
- Subekti, 1975, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Cetakan XI, Penerbit: Intermasa, Jakarta.
- Sudarto, 1986, ***Hukum Dan Hukum Pidana***, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, ***Penemuan Hukum***, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

- Sue Titus Reid, 1987, ***Criminal Justice Procedure and Issues***, West Publishing Company, New York.
- Sunaryo Wignyodipuro, 1979, ***Ilmu Hukum***, Cetakan ke II, Penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Suryono Sutarto, 2004, ***Hukum Acara Pidana***, Jilid II, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susilo Yuwono, 1982, ***Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)***, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Sri Sumanti, 1976, ***Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara***, Penerbit: Tarsito, Bandung.
- Tatang M. Amirin, 2001, ***Pokok-Pokok Teori Sistem***, Cetakan ke-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht, 1957, ***Pengantar Dalam Hukum Indonesia***, Cetakan ke-4, Penerbit: Ikhtiar, Jakarta.
- Weston, Paul B. & Kenneth M. Wells, ***Law Enforcement and Criminal Justice***, California: Goodyear Publishing Company, Inc.
- Wirjono Prodjodikoro, 1977, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Cetakan Ketujuh, Penerbit: Sumur, Bandung.
- Yahya Harahap, M, (I), 2003, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali***, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap, M, (II), 1985, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Jilid II, Penerbit: Pustaka Kartini, Jakarta.
- Zaenuddin, H, 2008, ***Filsafat Hukum***, Cetakan Kedua, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS).

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Angka 19.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... , Tahun ... , Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2007.

C. DOKUMEN INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights/UDOHR, Adopted by General Assembly of the United Nations, resolution 217 (III) of December 1948 (***Pernyataan Sejangat Hak-Hak Asasi Manusia***).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966
atau ***Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik***

D. KAMUS/ENSIKLOPEDIA

Ensiklopedia Nasional, 1996, Jilid 15, Penerbit: PT. Citra Adi Pustaka, Jakarta.

Tim Redaksi Tata Nusa, 1998, ***Kamus Istilah Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1998***, Penerbit: PT. Tata Nusa, Jakarta.

E. MAJALAH DAN SURAT KABAR

Adi Andoyo Soetjipto, 1996, “***Putusan Bebas Murni Hak Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat***”, Dalam: Kompas, Kamis, 21 November, Jakarta.

Agus Santoso, 2002, ***Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh Dikasasi***”, Dalam: Harian Media Indonesia, Selasa 10 September.

Busyro Muqqudas, M, 2009, “***Keadilan Sosial Harus Terwujud di Semua Sektor***”, Dalam: Komisi Yudisial, Vol. IV. No. 1, Agustus.

Soekarno, 1978, “***Dalih Verkapte Ontslag van Rechtsvervolging***”, Dalam: Pengayoman, Nomor 6, Tahun III, Juli.

Tim Redaksi Harian Nusa Bali, 2008, “***Mantan Bupati Cabul Divonis 6 Tahun Penjara, Menang di PN, Tumbang di Tingkat MA***”, Dalam: Harian Nusa Bali, Rabu, 3 Desember.

Tim Redaksi Harian Nusa Bali, 2008, “***Vonis Bebas Atas Muchdi PR, Jaksa Menuntut 15 Tahun Penjara***”, Dalam: Harian Nusa Bali, Rabu 14 Desember.

F. MEDIA ELEKTRONIK

<http://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2009/5.html>

<http://www.fact-index.com/c/co/courdecassation.html>

<http://www.justice.gouv.fr/anglais/minister/enm.htm#INFO>

<http://www.sfsu.edu/sclavier/research/frenchpenalsystem.doc>

<http://en.wikipedia.org/wiki/acquittal>